PENDIDIKAN DAN GENDER: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN DI DUNIA PENDIDIKAN

Gifra[1], Rio Hidayat[2], Muhiddinul Kamal[3]

[1,2,3]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : gifra0101@gmail.com[1], riohidayat@gmail.com[2], muhiddinurkamal@uinbukittinggi.ac.id[3]

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin dalam Islam bagi setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, realitas di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, masih menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam akses pendidikan akibat faktor sosial-budaya, kebijakan yang belum berpihak, serta ketimpangan sumber daya. Dalam konteks sosial, gender dipahami sebagai konstruksi sosial yang membentuk peran dan ekspektasi masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan, sehingga pendidikan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kritis terhadap kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kesetaraan gender dalam pendidikan menurut nilai-nilai Islam, mengidentifikasi penyebab kesenjangan gender, serta mengevaluasi upaya dan tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan gender. Metode yang digunakan adalah library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui analisis sumber primer (Al-Qur'an, hadis, dan karya ulama) serta sumber sekunder (jurnal ilmiah dan kebijakan pendidikan) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam menjamin kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh ilmu, namun praktik sosial masih dipengaruhi kultur patriarki, stereotip gender, dan lemahnya kebijakan afirmatif. Perkembangan teknologi digital dan kebijakan inklusif menjadi peluang untuk memperkuat kesetaraan gender. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi gender, penguatan kurikulum sensitif gender, dan dukungan keluarga serta masyarakat agar perempuan memiliki kesempatan yang sama. Implikasinya, kesetaraan gender dalam pendidikan merupakan investasi strategis untuk membangun sumber daya manusia unggul, berkeadilan, dan berakhlak.

Kata Kunci : *Pendidikan; Gender; Kesetaraan Gender; Keadilan Pendidikan*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin dalam Islam untuk setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin. Prinsip ini tercermin jelas dalam ajaran Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sayangnya, di beberapa negara Muslim, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan laki-laki. Hambatan-hambatan ini sering kali disebabkan oleh faktor sosial, kebijakan yang tidak mendukung, atau ketimpangan dalam sumber daya pendidikan. Dalam kajian sosial, gender merujuk pada konsep tentang peran, perilaku, dan identitas yang dibentuk oleh masyarakat dan dianggap cocok untuk kalangan jenis tertentu. Berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat biologis (pria dan wanita), gender menitikberatkan pada peran serta ekspektasi sosial yang terkait dengan setiap jenis kelamin.(Syaifullah dan Sukandi, 2021)

Gender melibatkan bagaimana norma-norma sosial dan budaya memengaruhi perilaku, sifat, serta peran yang dikaitkan dengan maskulinitas atau feminitas (Pratama & Saputra, 2023). Pembagian ini sering membentuk norma-norma tertentu tentang "apa yang diharapkan" dari pria dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keseharian, pekerjaan, dan keluarga. Menurut Hillary M. Lips menjelaskan bahwa gender berkaitan dengan harapan budaya terhadap pria dan wanita. Pandangan ini sejalan dengan perspektif feminis, seperti yang diungkapkan oleh Lindsey, yang berpendapat bahwa seluruh norma masyarakat terkait identitas pria dan wanita merupakan bagian dari studi gender, termasuk cara maskulinitas dan feminitas didefinisikan oleh masyarakat. Kesetaraan gender mengacu pada keadaan di mana peran sosial pria dan wanita seimbang, selaras, dan harmonis. Keadaan ini dapat dicapai melalui tindakan yang setara terhadap keduanya. Penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender harus disesuaikan dengan konteks dan situasi khusus di setiap lingkungan, dan tidak dapat didasarkan pada perhitungan matematis atau diterapkan secara universal.(Sulistyowati, 2021) Al-Qur'an menegaskan bahwa kedudukan seseorang di sisi Allah tidak dipengaruhi oleh gender, status sosial, atau latar belakang. Dalam Islam, setiap individu memiliki dua peran, yakni sebagai seorang abdi ('Abid) dan sebagai wakil Tuhan (Khalifah) di bumi, tanpa memandang gender, bangsa, ragam warna kulit, atau faktor lainnya. Penjelasan ini terdapat dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti (Setiawani, 2012)vas.

Dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan pesan mendalam tentang prinsip kesetaraan manusia yang menjadi landasan penting bagi pendidikan dalam konteks kesetaraan gender. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu asal, yaitu laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan kedudukan mereka di hadapan-Nya. Perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa, maupun latar belakang sosial bukanlah alasan untuk memberikan perlakuan yang berbeda dalam hal hak dan kesempatan, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam pandangan Islam, setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki tanggung jawab yang sama sebagai 'Abid (hamba Allah) dan Khalifah (pemimpin di bumi). Oleh karena itu, menuntut ilmu merupakan kewajiban yang tidak dibatasi oleh gender, karena melalui pendidikan seseorang dapat memahami

tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba sekaligus pengelola bumi yang adil dan berakhlak. Dengan menjadikan takwa sebagai ukuran kemuliaan, bukan jenis kelamin atau status sosial, Al-Qur'an mengajarkan bahwa pendidikan harus menjadi sarana untuk membentuk manusia yang bertakwa, berilmu, dan berkontribusi bagi kemaslahatan bersama. Prinsip ini menegaskan bahwa akses terhadap pendidikan harus diberikan secara adil kepada laki-laki dan perempuan, agar keduanya dapat mengembangkan potensi yang Allah karuniakan secara seimbang dalam menjalankan perannya di masyarakat.(Afif et al., 2021)

Kesetaraan akses pendidikan berbasis teknologi menghadapi tantangan besar baik di tingkat global maupun lokal. Di dunia internasional, salah satu kendala utama adalah ketimpangan infrastruktur antarnegara. Negara maju umumnya memiliki koneksi internet cepat, perangkat mutakhir, dan sistem pendidikan yang sudah terintegrasi dengan teknologi, sementara banyak negara berkembang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Perbedaan ini membuat kesenjangan kualitas pembelajaran semakin melebar di tingkat global. Kesetaraan akses pendidikan berbasis teknologi merupakan isu penting yang menentukan kualitas dan keadilan dalam dunia pendidikan, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesenjangan infrastruktur digital, literasi teknologi yang belum merata, serta faktor sosial-ekonomi menjadi hambatan utama yang memperlebar jurang digital antarwilayah dan antar kelompok masyarakat. Meski demikian, hadirnya berbagai kebijakan pemerintah, program pembangunan infrastruktur, serta dukungan pelatihan literasi digital membuka peluang untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Inovasi teknologi seperti platform pembelajaran digital, pembelajaran adaptif, hingga kolaborasi lintas batas menunjukkan potensi besar dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif. Namun, inovasi ini hanya akan efektif apabila didukung oleh regulasi yang tepat, infrastruktur memadai, dan sumber daya manusia yang kompeten. Dengan demikian, kesetaraan akses pendidikan teknologi bukan hanya tantangan, melainkan juga peluang strategis untuk membangun generasi yang lebih siap menghadapi tuntutan global. Secara keseluruhan, kesetaraan akses teknologi dalam pendidikan perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang. Upaya yang konsisten dan kolaboratif antara pemerintah, pendidik, masyarakat, serta sektor swasta akan menjadi kunci untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman.(Sugari & Hilalludin, 2025)

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga mereka akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam segala lapisan masyarakat di sepanjang zaman, dimana perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Dari sinilah doktrin ketidasetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan tersebut antara lain sebagai berikut:Marginalisasi terhadap perempuan berarti menempatkan perempuan pada posisi pinggiran dalam berbagai aspek kehidupan. Perempuan sering dicitrakan lemah, tidak rasional, dan tidak pantas memimpin, sehingga mereka kerap dinomorduakan dalam kesempatan berperan atau mengambil keputusan. Dalam pembangunan, perempuan sering dilibatkan tetapi pendapatnya jarang didengar; dalam keluarga, perempuan tidak diakui sebagai kepala rumah tangga; dan dalam diri mereka sendiri sering muncul rasa tidak percaya diri. Selain itu, stereotip masyarakat memperkuat diskriminasi gender dengan menetapkan peran tradisional, seperti tanggung jawab rumah tangga dan pendidikan anak yang sepenuhnya dibebankan pada perempuan. Hal ini membuat perempuan sulit

mengembangkan potensi dan kebebasan memilih profesi sesuai kemampuan (Khairunnisa et al., 2024).

Perkembangan Kesetaraan Gender di Dunia Pendidikan yaitu Kesetaraan gender dalam pendidikan merupakan salah satu isu penting yang terus mengalami perkembangan signifikan sepanjang sejarah. Pada masa awal, akses terhadap pendidikan bagi perempuan sangat terbatas, terutama dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki. Dalam pandangan tersebut, perempuan lebih banyak ditempatkan pada ranah domestik dan keluarga. Pendidikan yang diberikan kepada perempuan umumnya hanya berfokus pada keterampilan rumah tangga serta peran mereka sebagai istri dan ibu, yang dianggap sebagai tugas utama seorang perempuan. Sebaliknya, laki-laki memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk menempuh pendidikan formal dengan tujuan mempersiapkan diri memasuki dunia kerja dan menduduki posisi-posisi strategis dalam masyarakat.(Putra, 2025)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kepustakaan (library research) adalah metode yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari berbagai sumber tertulis untuk memahami teori atau konsep yang relevan. Metode ini berfungsi sebagai landasan teoritis yang memperkuat penelitian dan membantu menemukan kebaruan dalam studi yang sedang dilakukan. Data diperoleh dari sumber primer, seperti ayat Al-Qur'an, Hadits, dan karya ulama, serta sumber sekunder, seperti artikel jurnal, buku, dan laporan kebijakan pendidikan di negara-negara mayoritas Muslim.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur pada database akademik, perpustakaan digital, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, meliputi identifikasi konsep pendidikan dalam Islam, klasifikasi hambatan gender, serta evaluasi kebijakan yang berhasil mengurangi kesenjangan gender. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dari perspektif agama, sosial, dan kebijakan. Metode ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang kesetaraan gender dalam pendidikan Islam dan menawarkan solusi berbasis nilai-nilai Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendidikan dan Gender

Menurut para ahli, gender dapat dipahami sebagai isu yang berkaitan dengan perbedaan peran, kedudukan, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui proses sosial dan budaya. Gender bukanlah bawaan biologis, melainkan sebuah konstruksi sosial yang melekat pada individu berdasarkan harapan dan nilai-nilai masyarakat. Artinya, gender merupakan atribut yang disematkan pada seseorang, kemudian dikodifikasikan dan dilembagakan secara sosial maupun kultural, sehingga menimbulkan perbedaan peran dan perilaku antara laki-laki dan perempuan.Dalam konteks ini, masyarakat memiliki pikiran dan harapan tertentu mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berperan dan bertindak. Karena gender bersifat sosial dan terbentuk dari pengalaman kolektif masyarakat, maka pemahaman dan penempatan peran gender dapat berubah dari waktu ke waktu.

Konsep gender juga tidak bersifat universal, sebab setiap masyarakat memiliki pemaknaan yang berbeda tergantung pada latar sosial, budaya, dan historisnya. Dengan demikian, peran

gender bersifat dinamis dan dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa gender bukan merupakan kodrat atau hukum Tuhan, melainkan bentukan sosial yang dapat berubah dan direproduksi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Di hadapan Allah, pria dan wanita memiliki posisi yang sama. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan biologis antara keduanya, tetapi perbedaan tersebut tidak dijadikan sebagai dasar untuk membedakan status atau peran. Tidak ada satu jenis baik itu pria maupun wanita yang dianggap Lebih superior atau inferior dibandingkan yang lain, meskipun pemahaman tersebut masih banyak dipegang oleh sebagian orang. Keduanya memiliki tanggung jawab yang setara dalam menjaga keseimbangan alam, menegakkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Islam menekankan pentingnya keadilan antara pria dan wanita, terutama pada aspek Pendidikan.(Astina, 2016)

Kesetaraan gender merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, dan berkelanjutan. Namun, tantangan terhadap kesetaraan gender masih menjadi isu yang kompleks, melibatkan norma budaya, stereotip, dan struktur sosial yang tidak setara. Ketimpangan ini sering terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, dunia kerja, akses terhadap kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan berbagai sektor, salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan memiliki peran strategis sebagai alat transformasi sosial untuk mengatasi ketimpangan gender. Sebagai institusi yang tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, namun ikut membentuk nilai, sikap, dan perilaku, pendidikan dapat menjadi motor penggerak dalam mempromosikan kesadaran gender. Melalui pendidikan berbasis kesetaraan, individu dapat diberdayakan untuk memahami dan menentang norma-norma diskriminatif, serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan perubahan social (Tue et al., 2024).

Kesetaraan gender dalam pendidikan merupakan salah satu isu penting yang mengalami perkembangan yang signifikan sepanjang sejarah. Pada awalnya, pendidikan merupakan hak yang sangat terbatas bagi perempuan, terutama dalam tradisi masyarakat patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi domestik dan keluarga. Pendidikan yang tersedia bagi perempuan pada waktu itu lebih menitikberatkan pada keterampilan rumah tangga dan peran sebagai istri serta ibu, yang dianggap sebagai satu-satunya tugas utama. Sebaliknya, pendidikan formal yang lebih tinggi dan luas diberikan kepada laki-laki untuk mempersiapkan memasuki dunia kerja dan posisiposisi kekuasaan. Perkembangan pendidikan dan gender di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan kebijakan pemerintah. Pada masa awal kemerdekaan, akses pendidikan bagi perempuan masih sangat terbatas karena pengaruh budaya patriarki yang kuat, di mana peran perempuan dianggap hanya sebatas mengurus rumah tangga dan anak. Namun, seiring dengan berkembangnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, berbagai upaya dilakukan untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi perempuan dalam dunia pendidikan. Pemerintah mulai merancang kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan gender, seperti program wajib belajar dan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan formal maupun nonformal.

Meskipun demikian, kesenjangan gender dalam pendidikan masih dapat ditemukan, terutama di daerah pedesaan dan kawasan tertinggal. Faktor budaya yang menomorduakan perempuan, pandangan sosial yang bias gender, serta beban ganda perempuan dalam rumah tangga menjadi penghambat utama bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap peran perempuan. Kesetaraan gender dalam pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi yang lebih adil,

produktif, dan berdaya saing tinggi. Secara umum, perkembangan pendidikan dan gender di Indonesia menunjukkan tren positif. Semakin banyak perempuan yang menempuh pendidikan tinggi dan berperan aktif di berbagai bidang profesional. Namun, untuk mencapai kesetaraan yang sesungguhnya, diperlukan upaya berkelanjutan dalam membangun sistem pendidikan yang sensitif terhadap isu gender, memperkuat kebijakan afirmatif, serta menghapus stereotip yang masih menghambat perempuan dalam meraih potensi terbaiknya.(Putra, 2025)

Kesetaraan Gender di Dunia Pendidikan

Kesetaraan gender suatu pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang adil. Pendidikan memiliki peran strategis dalam mengurangi stereotip gender, mengubah pola pikir diskriminatif, dan meningkatkan partisipasi perempuan maupun laki-laki dalam berbagai sektor kehidupan. Kebijakan pendidikan yang adil, kurikulum berbasis kesetaraan gender, dan peran pendidik yang proaktif menjadi kunci utama untuk mendorong perubahan sosial yang lebih adil. Namun, tantangan masih ada, seperti akses pendidikan yang tidak merata, stereotip gender yang mengakar, dan minimnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan, program pendidikan, dan peran aktif masyarakat untuk memastikan kesetaraan gender tidak hanya menjadi visi, tetapi juga realitas yang dirasakan oleh semua individu. Dengan langkah ini, pendidikan dapat menjadi motor penggerak utama untuk menciptakan generasi yang lebih sadar akan pentingnya kesetaraan gender demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan (Susilawaty et al., 2021).(Faturachman Alputra Sudirman, 2021)

Dalam konteks kesetaraan gender, perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki, serta status yang setara, terutama dalam hal pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses pendidikan. Hak-hak perempuan dalam pendidikan juga diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: "Perempuan berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan pada tempat kerja, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan." Pasal ini menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.(Setiawan et al., 2025) Kesenjangan gender yang muncul dalam dunia pendidikan tentu ada faktor yang menyebabkannya. Menurut Arief Rahman, sebagaimana yang dikutip oleh Harum Natasha, ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kesenjangan gender dalam pendidikan, di antaranya:

Pertama, kultur yang menomorduakan perempuan. Tak bisa dipungkiri, kultur masyarakat Indonesia seolah-olah menempatkan perempuan sebagai sosok yang perannya hanya sebatas menjadi ibu bagi anak-anaknya serta mengurus rumah tangga semata. Mereka sebenarnya memiliki semangat yang tinggi untuk belajar dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun melepaskan diri dari kultur bukan sesuatu yang mudah. Hal ini menyebabkan banyak perempuan terutama di desa merasa cukup untuk sekolah sampai tingkat SMA saja. Kedua, sistem struktur sekolah kurang memberikan kesempatan bagi perempuan. Pandangan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi ternyata masih menyebar di sekolah dalam sistem struktur sekolah.

Ketiga, lemahnya kesetaraan gender. Istilah kesetaraan gender ternyata belum didukung dengan kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam lembaga negara. Lemahnya kesetaraan gender ini memerlukan resolusi politik yang menopang dan mengusung kesetaraan gender. Sebagai

contoh, peraturan daerah yang membedakan antara gaji perempuan dengan laki-laki.Keempat, manajemen rumah tangga belum seimbang, perempuan lebih mengalah. Perempuan cenderung mengalah demi mengurus anak dan keluarga, padahal sebenarnya dia masih bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi seperti S2 dan S3. Namun karena harus mengurus keluarga dan rumah tangga, akhirnya suami yang berkesempatan melanjutkan pendidikannya. Kelima, kesepakatan pasangan yang mengalahkan perempuan. Dalam menjalin sebuah hubungan yang serius seperti menjadi suami dan istri, biasanya ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk membangun rumah tangga. Kesepakatan-kesepakatan ini terkadang mengalahkan perempuan. Perempuan tak mampu berbuat banyak karena kultur di Indonesia kurang mendukungnya. Perempuan yang lebih ngotot memilih melanjutkan pendidikannya setelah menikah, dibanding memberikan kesempatan itu kepada suami, mungkin akan dipandang sebagai perempuan kurang baik (Harun, 2013).

Tantangan utama dalam penerapan kesetaraan gender adalah resistensi sosial terhadap perubahan, terutama di masyarakat yang memegang kuat nilai-nilai patriarkal. Selain itu, tantangan struktural, seperti keterbatasan anggaran pendidikan dan kurangnya infrastruktur yang mendukung anak perempuan, juga menjadi penghambat signifikan. Ketimpangan ini diperburuk oleh konflik, bencana, dan pandemi yang sering kali berdampak lebih besar pada anak perempuan dan perempuan muda. Oleh karena itu, kebijakan dan program harus dirancang untuk mengatasi tantangan ini secara komprehensif.

Penerapan kesetaraan gender dalam dunia pendidikan memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan. Ketika laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan belajar yang sama, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan potensi diri, berpartisipasi aktif dalam masyarakat, serta berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat terwujudnya kesetaraan tersebut, seperti adanya stereotip gender, bias dalam kurikulum, serta ketimpangan akses pendidikan di beberapa daerah. Tantangan lain muncul dari budaya patriarki yang masih kuat, yang sering kali menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan membatasi ruang gerak mereka di bidang pendidikan.

Di sisi lain, terdapat pula berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesetaraan gender di dunia pendidikan. Perkembangan teknologi digital, kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan inklusif, serta meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam pembangunan menjadi faktor pendorong yang signifikan. Melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, kesetaraan gender dapat diwujudkan secara lebih nyata. Dengan demikian, penerapan kesetaraan gender di dunia pendidikan bukan hanya sebuah tuntutan moral, tetapi juga merupakan strategi penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan bagi semua.(Huda, 2024)

KESIMPULAN

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam dan nilai-nilai universal kemanusiaan. Prinsip kesetaraan gender dalam pendidikan menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang sama dalam memperoleh ilmu pengetahuan serta mengembangkan potensi diri. Dalam konteks Islam, ajaran Al-Qur'an dan hadis menegaskan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh ketakwaan dan amal perbuatannya. Namun, dalam praktiknya, kesetaraan gender di bidang pendidikan masih

menghadapi berbagai tantangan, seperti budaya patriarki, stereotip sosial, ketimpangan kebijakan, serta keterbatasan akses, terutama bagi perempuan di daerah pedesaan dan masyarakat tradisional.

Meski demikian, perkembangan kesetaraan gender dalam dunia pendidikan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pemerintah dan lembaga pendidikan mulai menerapkan kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap isu gender, termasuk melalui perluasan akses pendidikan, peningkatan literasi digital, dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang. Peran pendidikan sangat penting sebagai sarana transformasi sosial untuk menghapus diskriminasi, membentuk pola pikir yang adil, dan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya kesetaraan gender. Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan masyarakat, dan kemajuan teknologi, diharapkan kesetaraan gender dalam pendidikan dapat terwujud secara nyata, sehingga baik laki-laki maupun perempuan mampu berkontribusi secara seimbang dalam pembangunan bangsa yang berkeadilan, berilmu, dan berakhlak.

DAFTAR PUSTAKA

Afif, M. N., Ubaidillah, A., & Sulhan. (2021). Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, *3*(2), 191–210.

Andy Riski Pratama, Yulius, Maysa Latifa, Syafrudin, & Messy. (2024). INOVASI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DALAM MENDORONG PENANAMAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL. *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam*, *4*(1), 145–152. https://doi.org/10.51806/an-nahdlah.v4i1.160

Astina, C. (2016). Ketimpangan Gender Dalam Pendidikan. *Studi Agama Dan Budaya: Manarul Qur'an*, *X*(13), 15–27. https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq/article/view/912

Faturachman Alputra Sudirman, F. T. S. (2021). KESETARAAN GENDER DALAM TUJUAN PEMBANGUNANBERKELANJUTAN (SDGs) : SUATU REVIUWLITERATURSISTEMATIS. *Journal Publicuho*, *5*(4), 46–65.

Harun, N. (2013). Ketidaksetaraan Gender di Bidang Pendidikan: Faktor Penyebab, Dampak, dan Solusi. *Jurnal Marwah*, *12*(1), 53–54.

Huda, S. F. (2024). Transformasi Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan: Strategi, Tantangan, Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan. *Journal of Child and Gender Studies*, *02*(02), 73–93.

Khairunnisa, K., Vedira, M., Charles, C., & Pratama, A. R. (2024). Guru Profesional dalam Perspektif Al-Qur'an dan UU NO 14 Tahun 2005 : Membangun Generasi Rabbani. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 1365–1378. https://doi.org/10.51178/jsr.v5i3.2195

Pratama, A. R., & Saputra, A. (2023). *Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap Aktivitas Belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 4 Kota Bukittinggi*. *3*(1).

Putra, A. (2025). Gender Dalam Pendidikan Dan Pembelajaran Untuk Mewujudkan Kesetaraan. *Journal GEEJ*.

Setiawan, R., Komara, E., & Komara, N. (2025). Kesetaraan Gender Dalam Akses Pendidikan di Pendidikan Tinggi: Sebuah Kajian Studi Fenomenologi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(1), 2218–2225.

Setiawani, M. I. (2012). *Al-Quran Al-Karim*. PT Al-Qosbah Karya Indonesia.

Sugari, D., & Hilalludin, H. (2025). Kesetaraan Akses Pendidikan Teknologi: Tantangan dan Peluang di Indonesia dan Dunia. *Journal of Multidisciplinary Research*, *1*(1), 44–56.

Sulistyowati, Y. (2021). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, *1*(2), 1–14. https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317

Susilawaty, F. T., Alputra, F., & Sudirman. (2021). Kesetaraan Gender Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Suatu Review Literatur Sistematis. *Journal Publicuho*, *5*(4), 46–65.

Syaifullah dan Sukandi. (2021). Gender Dalam PendidikanIslam. *Edupedia*, *06*(01), 87–93.

Tue, F., Samatowa, L., & Melo, R. H. (2024). Peran Pendidikan Dalam Mendorong Kesetaraan Gender di Masyarakat. *Jurnal Normalita*, *12*(3), 218–223.